

PROSES POLITIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEKUASAAN

Zakiah Maulidi Putri¹, Rindi Septi Ani², Masduki Duriyat³

¹²³Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati
maulidiputrizakiah@gmail.com , septianirindi29@gmail.com , masduki@uinscc.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas interaksi kompleks mengenai perumusan politik dalam menentukan kebijakan pendidikan. Melalui segala analisis dari literatur yang relevan, dengan menggunakan teknik analisis konten dan analisis tematik untuk mengidentifikasi konsep dan kunci literatur yang sesuai. Studi ini memeriksa bagaimana dinamika kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh kepentingan para pemangku pemerintahan. Artikel ini juga menyoroti siapa saja yang mengendalikan politik atau siapa pemimpinnya dalam melakukan proses perumusan suatu kebijakan pendidikan. Hal tersebut juga harus didasari dengan mengutamakan kebutuhan pendidikan jangka panjang sehingga kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi proses belajar mengajar, sumber daya pendidikan, kestabilan lingkungan pendidikan, dan kualitas hasil belajar siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik memiliki kekuasaan yang tinggi dalam menentukan kebijakan pendidikan dan untuk mengimplementasikannya maka harus melalui beberapa tahapan dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Proses Politik, Perumusan Kebijakan Publik dan Pendidikan

PENDAHULUAN

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 menetapkan bahwa segala kegiatan pendidikan di Indonesia dilaksanakan dalam suatu sistem yang mengupayakan secara maksimal tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia, baik sosial, politik, intelektual, spiritual, maupun kemampuan profesional.

Pendidikan ialah sebuah basis vital. Ketika pendidikan sudah tidak mampu memberi input positif maka semuanya akan hancur. Oleh karena itu, tanpa harus berargumen, pernyataan pendidikan harus mendapat perhatian khusus dan perlu menjadi kesepakatan bersama. Sebab, pendidikan adalah upaya kesadaran manusia yang tidak pernah ada habisnya (Putri & Salito, 2024) . Dalam konteks ini, pendidikan yang mendapat tanggung jawab besar atas keberlangsungan suatu peradaban manusia, perlu menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan seksama. Pendidikan pada hakekatnya adalah proses perubahan. Dalam proses perubahan itu, pendidikan harus mampu memberikan sumbangan optimal bagi transformasi menuju terwujudnya masyarakat madani. Pendidikan juga diharapkan mampu menunjang kelangsungan dan proses kemajuan hidup masyarakat.

Sebagai proses belajar, pendidikan harus mampu menghasilkan individu dan masyarakat religius yang secara personal memiliki integritas dan kecerdasan. Sebagai proses ekonomi, pendidikan merupakan suatu investasi yang dalam tingkat tertentu harus memberi keuntungan. Sebagai proses sosial-budaya, pendidikan merupakan bagian integral dari proses sosial-budaya yang berlangsung terus tanpa akhir.

Sedangkan sebagai proses politik, pendidikan harus dapat menciptakan dinamika kompleks yang mencerminkan nilai-nilai, prioritas, dan tujuan politik suatu pemerintahan (Hizratunaini, 2023). Penting untuk memahami bahwa pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan juga instrumen politik sebagai kekuasaan dalam membentuk pemikiran, nilai-nilai, dan identitas masyarakat sehingga negara memiliki standar kualitas pendidikan yang diinginkan dan disesuaikan dengan tuntutan zaman.

Keterkaitan pendidikan dan politik yang ada pada suatu negara juga hampir sulit untuk dipisahkan, karena pendidikan mempunyai peran yang besar terhadap negara. Lembaga pendidikan adalah tempat untuk mendidik warga negara agar dapat berguna dan berhasil bagi negara tersebut. Sedangkan politik adalah tentang menjalankan kekuasaan, pengaruh, dan otoritas serta membuat keputusan penting tentang nilai-nilai dan distribusi sumber daya. Kedua bidang tersebut berkaitan dengan proses pewarisan dan pendistribusian nilai-nilai dalam masyarakat (Hutagalung et al., 2024). Namun, realita pendidikan di Indonesia dapat dikatakan masih berjalan tertatih-tatih (tidak sesuai dengan harapan) sejak awal kemerdekaan, mulai dari orde lama (1945-1965), pada masa orde baru (1965-1998) dan pada masa orde reformasi (1998-sampai sekarang) pendidikan nasional belum memberi hasil yang optimal (Suwarno, 2016).

Kegagalan pendidikan di Indonesia pada dasarnya berakar pada persoalan ketiadaan kerangka pembangunan pendidikan nasional jangka panjang yang aspiratif, demokratis dan partisipatif serta tidak adanya konsistensi dan kesinambungan dalam melaksanakan rencana yang sudah ada. Hal ini dapat dilihat dari adanya pergantian pemerintahan yang berarti berganti pula kabinet yang menduduki jabatan pemerintahan dan secara otomatis kabinet tersebut juga memunculkan kebijakan-kebijakan yang baru pula termasuk kebijakan pendidikan. Politik memiliki kekuasaan yang tinggi dalam menentukan kebijakan-kebijakannya. Sebuah kebijakan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya melainkan adanya perencanaan dari sebuah fenomena-fenomena dan masalah yang muncul secara publik yang menjadi petunjuk arah bagi pelaksana kebijakan agar tujuan dari solusi permasalahan dapat terimplementasikan sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan. Namun, jika dilihat di lapangannya tidak semua kebijakan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya dan justru tidak menjadi solusi atas suatu permasalahan. Maka dari itu, sebelum diimplementasikan kebijakan pendidikan tentu harus melalui proses perumusan terlebih dahulu dalam menentukan kebijakan pendidikan, dan hendaknya hasil kebijakan yang telah dirumuskan juga dapat dikomunikasikan secara terus menerus kepada khalayak.

METODE

Metode penelitian ini ialah metode analisis yang menggunakan pendekatan kajian literatur. Sarwono menyatakan bahwa penelitian literatur adalah studi terhadap data-data dari berbagai buku referensi dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tersebut guna memperoleh landasan teori terhadap masalah yang sedang dipelajari (Munib & Wulandari, 2021). Pendekatan ini dipilih dikarenakan memungkinkan untuk menggali secara mendalam dinamika politik pendidikan dan proses perumusan kebijakan politik pendidikan. Serta memahami teori dan pendekatan dari perumusan kebijakan politik pendidikan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber data yang diambil dari studi literatur berupa sumber primer yaitu jurnal ilmiah, buku, berita yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data menggunakan metode analisis konten dan analisis tematik. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tema dan konsep kunci dalam literatur yang dikaji, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar tema, serta untuk memahami proses perumusan kebijakan politik pendidikan.

HASIL PENELITIAN

a. Proses Politik Pembuatan Kebijakan Pendidikan

Maksud dari ini ialah proses politik mencakup banyak segi, salah satu diantaranya adalah proses perumusan dan pelaksanaan keputusan politik. Setiap kegiatan politik selalu berkaitan dengan bagaimana proses perumusan dan pelaksanaan keputusan politik. Kata lain dari keputusan politik adalah kebijakan politik sebagai wujud dari tindakan politik. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Nevil Johnson dan United Nations yang mengartikan kebijakan politik sebagai perwujudan dari tindakan politik (Solichin Abdul Wahab, 1997)

Bila dalam konteks negara, kegiatan politik di dalamnya berkaitan dengan proses pembuatan atau perumusan serta implementasi keputusan politik yang bersifat publik. Keputusan politik suatu negara merupakan suatu kebijakan publik (*public policy*). Wujud paling kongkrit dari kebijakan publik dari negara adalah peraturan pemerintah, Keputusan menteri, keputusan presiden, undang-undang, dan lain-lain. Dalam proses pembuatan kebijakan publik, proses-proses politik sangat kental mewarnainya, mulai dari pemunculan isu, kemudian berkembang debat publik melalui media massa serta forum-forum terbatas, lalu ditangkap aspirasinya oleh partai politik untuk diartikulasikan dan dibahas dalam lembaga legislative, sehingga menjadi kebijakan publik. Bahkan terkadang, proses tersebut bila berlangsung lebih singkat. Misalnya dimulai dari munculnya isu-isu, kemudian berkembang menjadi debat publik, lalu ditangkap aspirasinya oleh pemerintah yang dituangkan dalam sebuah peraturan oleh pemerintah.

Semua hal di atas menandakan bahwa kebijakan-kebijakan public terlahir melalui proses-proses politik yang tidak sederhana. Bahkan sering terjadi, di dalam proses-proses politik tersebut muncul konflik-konflik politik antar beragam kepentingan yang tidak bisa dipertemukan. Biasanya konflik-konflik tersebut akan reda dengan sendirinya manakala berbagai kepentingan yang ada telah terjadi titik temu. Pembuatan kebijakan dari prosesnya dapat dikategorikan ke dalam beberapa tahapan diantaranya:

1. Identifikasi masalah dan agenda setting. Identifikasi masalah dan agenda setting, yaitu dengan mengidentifikasi masalah sosial dan melihat posisinya pada agenda pemerintah. Pada tahap identifikasi dan agenda setting pertanyaan penelitian yang dapat diutarakan dapat berupa identifikasi dan analisis persepsi dan definisi dari masalah kebijakan yang dapat berbeda pada waktu yang berbeda dan pada lokasi yang berbeda. Diskusi tentang sebuah masalah yang dapat lebih diutamakan dalam pembuatan kebijakan dibandingkan masalah lainnya juga muncul pada analisis tahap identifikasi masalah dan agenda setting. Penyusunan agenda setting dalam analisis kebijakan pendidikan dilakukan guna mencari tahu apa masalah sesungguhnya sehingga penting untuk melakukan analisis kebijakan pendidikan. Masalah kebijakan, menurut Lester dan Stewart, adalah kondisi yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat sehingga perlu dicari penyelesaiannya. Sedangkan agenda setting merupakan suatu tahapan untuk menemukan dan memutuskan masalah yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah untuk dibuat menjadi suatu kebijakan. Agenda setting juga menjadi sebuah langkah awal dari berbagai tahapan perumusan masalah kebijakan pendidikan. Sehingga agenda setting menjadi tahapan yang sangat penting dalam analisis rumusan masalah kebijakan pendidikan. Digaris bawahi juga agenda setting memperjelas tahapan perumusan masalah kebijakan pendidikan. Di dalam perumusan masalah kebijakan dibantu dengan agenda setting, nantinya akan diketahui ke arah mana kebijakan pendidikan itu dibuat oleh pemerintah.

2. Formulasi kebijakan. Formulasi berarti perumusan, sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Perumusan kebijakan pendidikan merupakan tahapan kedua dalam siklus kebijakan pendidikan. Sebagai tahapan kedua, formulasi kebijakan dengan sendirinya tidak dapat dilepaskan dari tahapan agenda setting. Secara fundamental tahapan ini terjadi tatkala pemerintah mengakui keberadaan masalah-masalah publik dan menyadari adanya kebutuhan dan tuntutan untuk melakukan sesuatu dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Karenanya dalam perumusan kebijaksanaan pendidikan, persoalan mendasar adalah merumuskan masalah kebijakan (policy problems) dan merancang langkah-langkah pemecahannya (solution). Merumuskan masalah-masalah kebijakan berarti memberi arti atau menerjemahkan problema kebijakan secara benar, sedang merumuskan langkah pemecahan menyangkut perancangan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah publik tersebut. Dalam konteks perumusan masalah kebijakan, William Dunn mengatakan bahwa ada 4 (empat) macam fase proses yang saling bergantung yaitu: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengendalian masalah (Abubakar Basyarahil, 2011).
3. Legitimasi (Pengesahan). Setelah kebijakan berhasil diformulasikan, sebelum diterapkan pada masyarakat, kebijakan tersebut haruslah memperoleh legitimasi (pengesahan) atau kekuatan hukum yang mengatur penerapan (implementasi) kebijakan pada masyarakat. Legitimasi sangat penting karena akan membawa pengaruh terhadap masyarakat banyak, baik yang menguntungkan bagi sebagian masyarakat maupun yang membawa dampak yang merugikan kelompok lain. Selain itu setiap kebijakan juga membawa implikasi terhadap anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah. Pada umumnya wewenang melakukan legitimasi dimiliki oleh pemerintah atau badan legislatif. Namun kalau dikaji lebih mendalam, bahwa proses legitimasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara negara dan rakyat sebagai sumber legitimasi yang paling utama, sebab ukuran legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah sangat tergantung pada tersedianya dukungan bagi pemerintah dan apa yang ingin diperoleh dari masyarakat (Imron, 2002).

b. Pendekatan dalam Perumusan Kebijakan

1. Pendekatan Social Demand Approach. Sosial demand approach adalah suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada jenis pendekatan jenis ini para pengambil kebijaksanaan lebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Pendekatan social demand sebenarnya tidak sematamata merespon aspirasi masyarakat sebelum dirumuskannya kebijakan pendidikan, akan tetapi juga merespon tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan diimplementasikan. Partisipasi warga dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan terjadi baik pada masa perumusan maupun implementasi kebijakan pendidikan. Dalam perumusan kebijakan dapat digolongkan ke dalam tipe perumusan kebijakan yang bersifat pasif. Artinya suatu kebijakan baru dapat dirumuskan apabila ada tuntutan dari masyarakat terlebih dahulu.

2. Pendekatan Man-Power Approach. Pendekatan jenis ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumberdaya manusia (human resources) yang memadai di masyarakat. Pendekatan manpower ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan. Pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Dapat dipetik aspek penting dari pendekatan jenis kedua ini, bahwa secara umum lebih bersifat otoriter. Man-power approach kurang menghargai proses demokratis dalam perumusan kebijakan pendidikan, terbukti perumusan kebijakannya tidak diawali dari adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat, akan tetapi langsung saja dirumuskan sesuai dengan tuntutan masa depan sebagaimana dilihat oleh sang pemimpin visioner. Terkesan adanya cara-cara otoriter dalam pendekatan jenis kedua ini. Namun dari sisi positifnya, dalam pendekatan man-power ini proses perumusan kebijakan pendidikan yang ada lebih berlangsung efisien dalam proses perumusannya, serta lebih berdimensi jangka panjang. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana di kemukakan oleh Mark Olsen & Anne-Maie O’Neil kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan. Marget E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kebijakan pendidikan dipahami oleh peneliti sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara secara keseluruhan. Secara teoritik, suatu kebijakan pendidikan dirumuskan dengan mendasarkan diri pada landasan pemikiran yang lebih ilmiah empirik. Kajian ini menggunakan pola pendekatan yang beragam sesuai dengan faham teori yang dianut oleh masing-masing penentu kebijakan. Dalam kajian ini, paling tidak ada dua pendekatan yang dapat direkomendasikan kepada para penentu/berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan.(MUID et al., 2023)

c. Teori Perumusan Kebijakan dalam Pendidikan

Usaha perumusan kebijakan pendidikan dalam buku Prof. H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho melalui penelitian (Abdul Muid, et al, 2023) mengemukakan tiga belas teori perumusan kebijakan yaitu teori incremental, demokratis, strategis, dan pilihan publik yakni di bawah ini:

1. Teori Inkrementalis. Teori ini melihat bahwa kebijakan publik merupakan variasi atau kelanjutan dari kebijakan di masa lalu sehingga perlu mempertahankan kinerja baik yang telah dicapai, teori ini memiliki sifat pragmatis.
2. Teori Demokratis. Teori ini implementasinya pada good governance bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konstituen, dan pemanfaat (beneficiaries) diakomodasi keberadaan. Apabila teori ini mampu dijalankan maka sangat efektif karena setiap pihak mempunyai kewajiban untuk ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan karena masing-masing pihak bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan,
3. Teori Strategis. Inti dari teori ini adalah perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksploratif alternatif dan menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang. Fokusnya lebih kepada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu, lebih menekankan kepada penilaian terhadap lingkungan di luar dan di dalam organisasi dan berorientasi kepada tindakan. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi untuk berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah masa depan, menciptakan prioritas, membuat keputusan sekarang dengan memperhatikan konsekuensi masa depan.
4. Teori Pilihan Publik. Teori ini sebagai proses formulasi keputusan kolektif dari setiap individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Intinya setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus merupakan pilihan dari publik yang menjadi pengguna. Dalam menyusun kebijakan, pemerintah melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan dan ini secara umum merupakan konsep formulasi kebijakan yang paling demokratis karena memberi ruang yang luas kepada publik untuk mengkontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan (MUID et al., 2023).

d. Aneka Ragam Kebijakan Politik & Kebijakan Publik

Pada umumnya diambil dari proses politik. Secara politis, suatu kebijakan dirumuskan biasanya dipengaruhi oleh siapa yang terlibat, dalam situasi bagaimana suatu kebijakan sedang dibahas, berapa banyak dan dari kelompok mana tuntutan-tuntutan masyarakat didesakkan. Dengan adanya faktor-faktor tersebut menyebabkan tarik menarik kepentingan antar kelompok yang terlibat. Ada tiga proses politik sebelum kebijakan dirumuskan:

1. Pertama, dalam proses akumulasi aspirasi. Pada tahap ini tuntutan dan aspirasi banyak bermunculan di Masyarakat lewat isu-isu serta diskursus publik. Melalui jangka waktu tertentu, segenap tuntutan yang ada pada akhirnya mengalami akumulasi, dan mengelompok dalam beberapa jenis dan macam tertentu. Pada tahap akumulasi, biasanya semua tuntutan dan aspirasi yang bermunculan dimasyarakat lewat isu-isu serta diskursus publik yang diintrodusir oleh anggota-anggota masyarakat yang tergabung dalam aneka macam kelompok kepentingan. Kehadiran kelompok kepentingan (*interest group*) dalam proses politik adalah hal yang wajar. Lebih-lebih dalam masyarakat atau Negara yang menjunjung tinggi semangat demokrasi, kehadiran kelompok ini justru didorong dan diberi disalurkan resmi

2. Kedua, adalah proses artikulas. Pada tahap ini semua tuntutan yang ada diperjuangkan oleh masing-masing pemiliknya atau perwakilannya untuk bisadiakomodasikan dalam rumusan kebijakan.
3. Ketiga, adalah proses akomodasi. pada proses yang ketiga ini, tidak semua tuntutan bisa diakomodasikan. Hanya beberapa aspirasi dan tuntutan dari kelompok tertentu yang bisa terakomodasi di dalamnya.

Kelompok kepentingan (*interest groups*) menurut Amond, merupakan semua organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa pada saat yang sama berkeinginan untuk memperoleh jabatan public. Pertanyaan ini sangat jelas bahwa kehadiran kelompok kepentingan berusaha untuk terlibat dalam mempengaruhi terhadap setiap perumusan dan penerapan kebijakan-kebijakan public, tanpa harus mengejar bahkan merebut kedudukan dan jabatan public. Meskipun harus juga diakui ada kelompok kepentingan politis (*political interest groups*) dan kelompok kepentingan non-politis (*non political interest groups*). Almond membagi kelompok kepentingan ke dalam 4 kelompok, yaitu:(Amond, 1974)

1. Kelompok anatomic. Merupakan suatu Gerakan-gerakan Masyarakat yang berbentuk penekanan yang bersifat spontan terhadap system politik. Kelompok ini dapat dilihat dalam wujud kerusuhan, demonstran, Tindakan kekerasan politik, sikap-sikap apatis Masyarakat dan lain-lain. Letupan-letupan spontan tersebut muncul terutama jika kelompok yang terorganisis absen atau kurang bisa mewakili secara memadai dalam system politik
 2. Kelompok nonassosiasional. Kelompok ini sedikit tampak dalam komunitas alamiah yang tidak terwakilkan oleh suatu organisasi formal seperti kekerabatan, keturunan, etnik, regional, status, kelas sosial dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya kelompok jenis ini bisa menata diri dan memperbaiki diri menjadi kelompok institusional yang semakin berlembaga
 3. Kelompok institusional. Kelompok kepentingan institusional, entitas yang memiliki struktur dan tujuan spesifik, memegang peran penting dalam dinamika sosial dan politik suatu negara. Dari panggung politik hingga ranah ekonomi, keberadaan mereka sering kali menjadi penentu dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Salah satu ciri utama dari kelompok kepentingan institusional adalah keberadaan struktur yang terorganisir. Mereka memiliki hierarki, peraturan, dan tujuan yang jelas, mirip dengan lembaga formal lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengoordinasikan aksi dan strategi dalam mencapai tujuan mereka. Sebagian besar kelompok kepentingan institusional juga memiliki hubungan erat dengan lembaga pemerintahan. Mereka seringkali menjadi mitra penting dalam proses pembuatan kebijakan, memberikan masukan, dan membentuk arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
 4. Kelompok assosiasional. Kelompok ini adalah kelompok yang sudah menyatakan kepentingannya secara eksplisit dari suatu kalangan khusus bahkan lebih jauh lagi dan ada yang sudah menampakkan afiliasi politiknya terhadap partai politik tertentu
- e. **Pengaruh Kebijakan Public terhadap Dunia Politik**
- Terdapat beberapa kebijakan public yang mempengaruhi dunia politik diantaranya :
1. Kebijakan dalam alokasi dan distribusi sumber. Kebijakan public dalam alokasi dan distribusi sumber ini adalah pembagian dan penjatahan sumber-sumber baik yang bersifat material-jasmaniah maupun yang bersifat spiritual-rohaniah, dalam rangka pemenuhan kesejahteraan Masyarakat. Misalnya dalam hal makanan, pakaian, tanah, Kesehatan, Pendidikan, rekreasi, beribadah dan lain-lain. Pemerintah sebagai

Lembaga yang berkewajiban melakukan itu semua akan dapat memenuhinya manakala Keputusan yang bersifat ekstraktif mampu memberikan sumber yang cukup bagi pemerintah selaku pembuat sekaligus pelaksana kebijakan public

2. Kebijakan dalam penyerapan sumber material dan manusiawi . Kebijakan public menyangkut penerapan sumber-sumber material antara lain berupa penetapan pajak, pengolahan barang tambang, Adapun dalam bidang Pendidikan kebijakan public yang menyangkut sumber-sumber manusiawi anantara lain seleksi calon pegawai negeri sipil, pengangkatan serta penempatan CPNS dan PPPK selain itu juga penempatan kepala sekolah , tenaga perpustakaan, tenaga tata usaha dan lain-lain.
3. Kebijakan dalam hal pengaturan perilaku. Kebijakan dalam perilaku tentang Pendidikan diatur dalam Undang-Undang system Pendidikan Nasional.(Ramlan Subakti, 1984)

f. Aktor-Aktor Perumusan Kebijakan Pendidikan

Aktor adalah pelaku yang terlibat dalam proses merumuskan formulasi kebijakan yang akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat intern, dalam artian mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan tersebut, disebut pembuat kebijakan (policy maker). Sementara itu, aktor yang mempunyai kualifikasi atau karakteristik lain dengan tuntutan ekstern, dikenal sebagai kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, pimpinan elit profesi dan lain-lain. Untuk dapat tetap bertahan bermain di dalam sistem tersebut, mereka harus memiliki komitmen terhadap aturan main, yang pada mulanya dirumuskan secara bersama-sama oleh semua aktor. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan tersebut terbagi dalam:

1. Legislatif. Legislatif sering dimaksudkan sebagai pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan. Peran mereka sangat menentukan, karena pengesahan suatu tata aturan agar menjadi kebijakan seperti undang- undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah ada ditangan mereka. Legislatif disebut sebagai aktor utama dalam merumuskan / mengesahkan kebijakan, para legislator tersebut berada pada tataran MPR, DPD, DPR, DPRD I, dan DPRD II.
2. Eksekutif. Eksekutif di sini adalah para pelaksana undang-undang sekaligus berperan dalam merumuskan kebijakan agar kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional. Eksekutif biasanya merumuskan kembali kebijakan yang dibuat legislatif dalam bentuk kebijakan jbaran. Eksekutif memiliki kekuasaan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif serta merumuskan kembali atau tidak merumuskan dengan alasan tertentu. Aktor eksekutif disini antara lain Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala Dinas. Sedangkan aktor eksekutif dalam bidang pendidikan adalah Mendiknas, Menag, Dirjen, Kepala Dinas, dan Rektor.
3. Administrator. Administrator sebagai perumus dan implementator kebijakan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan Negara yang akan terimplementasikan dalam setiap program nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat, dengan tujuan utama masyarakat sejahtera. Formulasi merupakan langkah awal dan menjadikan pedoman bagi para admistratur dalam menjalankan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya. Administrator sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan

suatu kebijakan yang dibuatnya. Administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Peran administrator sebagai aktor dalam kebijakan sangat menentukan akan terumusnya suatu kebijakan untuk tercapainya suatu tujuan dengan berbagai keahlian yang dimiliki oleh administrator, Peran para aktor administrator dalam proses suatu kebijakan akan ditentukan oleh kecermatan dan kepiawaian dalam memahami dan melaksanakan tahapan-tahapan proses kebijakan itu dirumuskan. Kegiatan ini merupakan pengawalan agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan harapan.

4. Partai Politik (Parpol). Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jajaran pemerintahan. Di Indonesia peran Parpol sangat besar sehingga hampir semua aspek kebijakan termasuk dalam bidang pendidikan akan melibatkan Parpol. Peran parpol disini dengan menempatkan anggotanya di legislatif dan pimpinan Negara maupun daerah.
 5. Interest Group (kelompok berkepentingan). Interest Group ialah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan sama, seperti kelompok buruh, nelayan, petani, guru, dan kelompok profesional lainnya. Kelompok ini berusaha mempengaruhi perumus kebijakan formal agar kepentingan kelompoknya dapat terakomodasi dalam kebijakan yang dirumuskan. Kelompok ini biasanya memiliki tuntutan yang bersifat khusus, sempit, dan spesifik.
 6. Organisasi Masyarakat (Ormas). Ormas merupakan kumpulan orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan sama, bersifat nonpolitis meskipun dalam kiprahnya sering bersentuhan dengan kepentingan politik. Ormas dapat berdiri sendiri (independen) atau berafiliasi dengan organisasi politik tertentu. Dalam perumusan kebijakan pendidikan ormas memiliki harapan dan aspirasi yang kemudian disampaikan kepada para perumus kebijakan formal. Di Indonesia ada beberapa ormas yang memiliki pengaruh besar dalam perumusan kebijakan pendidikan oleh pemerintah seperti NU, Muhammadiyah, ICMI, HMI, PMII, dan KAHMI.
 7. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah suatu lembaga dimana para elite akademisi berada, perguruan tinggi sering dijadikan ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam rumusan kebijakan. Peran perguruan tinggi menjadi sangat penting karena disini nilai-nilai idealisme masih dipertahankan, dan dalam mengupayakan berbagai kebijakan tidak akan lepas dari muatan- muatan intelektual. Perumusan kebijakan yang baik seharusnya memuat naskah akademik yang dibahas bersama para akademisi di perguruan tinggi.
 8. Tokoh perorangan. Dalam berbagai konstelasi, tokoh perorangan memegang peran cukup vital dan terkadang sangat menentukan, dia juga dapat menjadi tokoh sentral. Tokoh perorangan dapat berasal dari berbagai bidang seperti keagamaan, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, dan sebagainya.
- g. Pemecahan Permasalahan Pendidikan Melalui Kebijakan Politik**
- Menurut Charles O.Jones suatu kebijakan mencankup lima hal diantaranya:
1. Pertama kali suatu kebijakan yang hendak diwujudkan harus memiliki tujuan (goal) yang diinginkan.
 2. Kedua, tujuan yang diinginkan itu harus pula direncanakan (plans) atau harus ada proposal, yakni pengertian yang spesifik dan operasional untuk mencapai tujuan.
 3. Ketiga harus ada program yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
 4. Keempatnya adalah decision, yaitu segenap Tindakan untuk mencapai tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.

5. Serta kelima adalah effect, yaitu akibat-akibat dari program baik yang diinginkan atau disengaja maupun tidak disengaja baik yang primer maupun yang sekunder.

Banyaknya masalah yang hendak diselesaikan negara bukan berarti akan menimbulkan banyaknya kebijakan yang bersifat public. Dalam pandangan negara, tidak semua masalah akan menjadi isu public sehingga, mendorong untuk dibuatkannya kebijakan public. Ada juga masalah yang menjadi isu hanyalah pada level privat atau level kolektif, sehingga belum menjadi isu public. Masalah privat adalah suatu masalah yang memiliki akibat terbatas tetapi masalah public adalah masalah yang memiliki akibat luas yang menyangkut hamper semya warga dalam satu wilayah.

Menurut Oberlin Silalahi, ada beberapa tipe peristiwa dan isu penting dalam konteks politik yang mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan public meliputi:(Oberlin Silalahi, 1989)

1. Peristiwa, yaitu kegiatan-kegiatan manusia atau alam yang dipandang memiliki konsekuensi pada kehidupan sosial
2. Masalah, yaitu kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan manusia yang harus diatasi atau dipecahkan
3. Masalah umum, yaitu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipecahkan secara pribadi
4. Isu, yaitu masalah umum yang bertentangan satu sama lain atau masalah umum yang diperdebatkan.
5. Area isu, yaitu sekelompok masalah-masalah umum yang saling bertentangan

Masalah Pendidikan adalah salah satu masalah yang bersifat Universal. Semua manusia tanpa terkecuali sangat berkepentingan terhadap Pendidikan. Bagi anak remaja, Pendidikan merupakan suatu hak yang harus diterima dengan baik melalui sekolah (*School education*) maupun luar sekolah (*Out of school Education*). Bagi orang tua anak, Pendidikan merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada anaknya dalam wujud pelayanan, bimbingan dan hal lain-lain yang mendukung pemuasan haka nak. Bagi orang dewasa Pendidikan juga merupakan hak dalam arti hak untuk menjalani Pendidikan sepanjang hayat. Dengan demikian, masalah-masalah kehidupan yang menyangkut dunia Pendidikan merupakan masalah yang bersifat public.

Bagi Masyarakat marginal seperti orang tidak mampu maupun kaum pedalaman akan mengalami kesulitan dalam memperoleh kesempatan Pendidikan secara memadai. Mereka memiliki keterbatasan dalam mencari layanan Pendidikan yang bermutu dan mudah dijangkau secara geografis. Sehingga yang terjadi kelompok miskin dan kaum pedalaman ini hanya memperoleh layanan Pendidikan yang kurang bermutu dan kurang terjangkau dari segi geografis. Banyak dari lapisan menengah ke atas banyak diuntungkan untuk memperoleh dan memilih layanan Pendidikan yang disukai, mereka bisa “membeli” Lembaga Pendidikan yang disukai dan dimasuki termasuk pada Lembaga-lembaga Pendidikan (sekolah dan universitas) yang dikenal Favorite.

Persoalan lain dalam dunia Pendidikan adalah menyangkut kendala pluralism yang amat kompleks dari Masyarakat Indonesia. Sehingga, sejak tanggal 1 Januari 2001 Indonesia telah melakukan terobosan dengan melaksanakan otonomi daerah untuk masing-masing daerah Tingkat II. Konsekuensi dari terobosan tersebut adalah beberapa segi pengelolaan Pendidikan juga mengalami otonomi daerah. Hal ini secara positif bisa mendekatkan problem Pendidikan terhadap kondisi multicultural bangsa Indonesia. Persoalan ini bersifat public sehingga dalam sebuah perumusan kebijakan ditunjukkan untuk memecahkan masalah-masalah krusial seperti masalah Pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa politik merupakan upaya untuk memperoleh, memperluas, dan mempertahankan kekuasaan, mewujudkan tujuannya dengan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan vital masyarakat. Di sisi lain, pendidikan memberikan kontribusi besar dalam penguatan masyarakat sebagai proses sosialisasi peserta didik ke dalam sistem kehidupan yang mempunyai aspek lokal, nasional, dan global, dan ini merupakan salah satu pilar pendidikan. Hubungan antara pendidikan dan politik sangatlah erat dan bahkan selalu berhubungan, sehingga dalam situasi ini kebijakan nasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan pendidikan suatu negara. Oleh karena itu, arah pendidikan ditentukan oleh siapa yang mengendalikan politik atau siapa pemimpinnya. Hal tersebut juga harus didasari dengan perumusan kebijakan politik yang mengutamakan kebutuhan pendidikan jangka panjang sehingga kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi proses belajar mengajar, sumber daya pendidikan, kestabilan lingkungan pendidikan, dan kualitas hasil belajar siswa.

REFERENSI

- Abubakar Basyarahil. (2011). Kebijakan Publik dalam Perspektif Teori Siklus Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 2, 7.
- Amond, G. A. (ed). (1974). "Comparative Politics Today's : A World View". In *Boston: Crown and Company*.
- Hizratunaini. (2023). Pendidikan dan Kekuasaan Analisis terhadap Peran Politik dalam Pembentukan Sistem Pendidikan. *Kompasiana.com*, 1–5. <https://www.kompasiana.com/ijhahzrtn3798/6588e4fa12d50f4e5d00cee2/pendidikan-dan-kekuasaan-analisis-terhadap-peran-politik-dalam-pembentukan-sistem-pendidikan>
- Hutagalung, F., Saragih, T. J. R., Susanti, S., & Fandy, S. (2024). Pengaruh Politik Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia Menurut Mahasiswa PPKn Unimed Stambuk 2023. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2(2), 1412–1416.
- Imron, A. (2002). Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. In *Bumi Aksara*.
- MUID, A., Fuadi, A. D. Z., Albasami, & Sisnawati3. (2023). «Proses Kebijakan Dalam Perumusan Pendidikan Di Indonesia». *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam (JIPPI) PONDOK PESANTREN MAZIYATUL ILMI*, 11(11), 40–63. <https://jurnal.maziyatulilmi.com/index.php/jippi/article/view/67>
- Munib, A., & Wulandari, F. (2021). Studi Literatur: Efektivitas Model Kooperatif Tipe Course Review Horay Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 7(1), 160–172. <https://doi.org/10.29407/jpdn.v7i1.16154>
- Oberlin Silalahi. (1989). "Beberapa Aspek kebijakan Negara". In *Jakarta: Liberty*.
- Putri, P. C., & Salito. (2024). IMPLIKASI TERHADAP TRANSFORMASI SOSIAL DALAM. *Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, 4 No 1, 14–20. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.30659/mjis.4.1.14-20> semakin
- Ramlan Subakti. (1984). "Perbandingan Sistem Politik". In *Surabaya : Mecphisho Grafika*.
- Solichin Abdul Wahab. (1997). " Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara". In *Jakarta : Bumi Aksara. Hal 3*.
- Suwarno, S. (2016). Pendekatan Kebijakan Publik dalam Politik Pendidikan Islam. *Jurnal As-Salam*, 1(1), 62–72. <http://www.jurnal-assalam.org/index.php/JAS/article/view/45>